


# Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

*The Effect of Regional Genuine Income, General Allocation of Funds and Capital Expenditures on The of Regency Regional Financial Independence Brebes (Empirical Study on Local Government of Brebes Regency for the 2018-2022 Periode)*

Melly Pitria Indriani<sup>1\*</sup>, Hilda Kumala Wulandari<sup>2</sup>, Titi Rahmawati<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

E-mail: <sup>1\*</sup>[mellyindri51@gmail.com](mailto:mellyindri51@gmail.com), <sup>2</sup>[hilda060791@gmail.com](mailto:hilda060791@gmail.com), <sup>3</sup>[titirahmawati165@gmail.com](mailto:titirahmawati165@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<b>Article History:</b> Received: 15 Dec 2023 Revised: 18 Dec 2023 Accepted: 20 Dec 2023	<i>Regional Financial Independence is one of the main elements that determines whether a regional government has been able to reduce dependence on transfer revenues to finance its own government activities through local revenue as a form of regional autonomy. The purpose of this study is to determine the factors that influence regional financial independence through local revenue, general allocation funds and capital expenditures either partially or simultaneously. Sampling technique using saturation sampling technique. The research method is quatitive, the type of data used is secondary data, the data analysis method used descriptive statistical tests, classical assumption test, the data analysis techniques used multiple linear regression and to test hypotheses using t (partial) and f (simultan) with the help of SPSS. The results of the study stated that regional original income partially had a positive significant effect, General allocation funds have a negatif significant effect and capital expenditures have no effect on the level of regional financial independence and simultaneously regional original income, general allocation funds and capital expenditures have a significant effect on the level of regional financial independence.</i>
<b>Keywords:</b> Regional Original Income, General Allocation Fund, Capital Expenditures, Regional Financial Independence	
<b>Corresponding Author:</b> <b>Melly Pitria Indriani</b> E-mail: <a href="mailto:mellyindri51@gmail.com">mellyindri51@gmail.com</a>	<i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license.</i> 

## Abstrak

Kemandirian Keuangan Daerah menjadi salah satu elemen utama yang menentukan apakah suatu pemerintah daerah telah mampu mengurangi ketergantungan akan pendapatan transfer untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya sebagai wujud dari otonomi daerah. Bergantungnya pemerintah daerah akan menunjukkan semakin rendah tingkat kemandirian keuangannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal baik secara parsial maupun simultan. Teknik penarikan sampel dengan teknik sampling jenuh. Metode penelitian berjenis kuantitatif, jenis data yang dipakai adalah data sekunder, metode analisis data memakai uji statistik deskriptif, uj asumsi klasik, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menyatakan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan, Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah; dana alokasi umum; belanja modal; kemandirian keuangan daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini mengalami banyak perubahan dalam berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial serta kemasyarakatan menjadi ciri dampak dari adanya reformasi yang terjadi. Sebelum adanya reformasi, daerah di Indonesia menunjukkan kondisi keuangan daerah sepenuhnya belum mampu lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur kebutuhan daerahnya [1]. Situasi tersebut menandakan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dibandingkan pendapatan daerahnya sendiri [2]. Otonomi daerah merupakan salah satu agenda dari era reformasi, yang dilaksanakan sebagai bentuk perubahan yang dapat dikatakan positif akibat dari krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 diakibatkan dari penerapan ekonomi yang bersifat sentralistik atau terpusat sehingga ekonomi pemerintah daerah ketergantungan dengan pusat. Secara tidak langsung otonomi daerah mempunyai tujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam segi apapun salah satunya pada keuangannya [3]. Pemerintah pusat menganggap pemerintah daerah dianggap paham akan kebutuhannya sendiri terutama dalam konteks perekonomian dan didaulat untuk melaksanakan roda pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan [4].

Di Era desentralisasi fiskal, pelaksanaannya tidak boleh hanya terfokus pada dana dari pemerintah pusat seperti dana perimbangan. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan kemampuan dan komponen yang dimiliki sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah dijadikan gambaran pemerintah akan hal ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat/provinsi, kemandirian juga memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah apakah dapat membiayai sendiri kegiatan urusan pemerintah. Pemanfaatan dan penerimaan PAD yang kurang optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian. Kondisi tersebut juga terjadi pada Kabupaten Brebes yang menunjukkan pendapatan asli daerah yang masih rendah jika dibandingkan dengan dana transfer pemerintah, sehingga dari fenomena tersebut nampak Pemerintah Kabupaten Brebes masih mengandalkan pada dana transfer pemerintah pusat yang cukup besar. Hal tersebut bisa disebabkan karena daerah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya yang berpeluang besar pada penerimaan daerah. Berikut tabel perhitungan rasio keuangan Kabupaten Brebes:

**Tabel 1.** Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2019

No	Rasio	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kemakmuran PAD	26,57	26,66	26,70	26,97	26,76	26,73
2	Ketergantungan Keuangan	69,88	68,01	64,11	77,68	71,11	71,36

Sumber: BPKAD Kabupaten Brebes, data diolah (2023)

Berdasarkan rasio keuangan tingkat kemakmuran dari pendapatan asli daerah menunjukkan rata-rata 26,73% dapat diketahui tingkat kemakmuran dari pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2018-2020 belum ternilai makmur disebabkan tingkat kemakmurannya masih berada dibawah rata-rata selama lima tahun. Selain itu, Tingkat ketergantungan keuangan memiliki rata-rata 71,36%. Artinya selama lima tahun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer yang diperoleh masih ternilai tinggi, sehingga dari fenomena yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangannya. Pembiayaan daerah yang meningkat, sementara PAD tidak selalu bertumbuh dengan konsisten sementara ketergantungan pada dana perimbangan juga masih berjalan akan dapat mempengaruhi tingkat kemandiriannya. Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022 dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun, tingkat

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

kemandirian Kabupaten Brebes sebesar 18,65% dengan tingkat hubungan bersifat instruktif, artinya pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai kemampuan keuangan yang rendah dan belum sepenuhnya mandiri dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan implementasinya daerah lebih banyak mempunyai struktur kontribusi PAD relatif kecil dari total penerimaan daerah. Dana perimbangan juga menjadi salah satu penerimaan daerah yang berkontribusi besar terhadap struktur APBD. Akan tetapi jangan dijadikan sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi dijadikan sebagai pendapatan pendukung pelaksanaan pemerintah atau pembangunan daerah.

Kabupaten Brebes menjadi salah satu kabupaten yang memiliki beragam sumber daya dari berbagai sektor baik hayati maupun nonhayati. Sektor pertanian Brebes dikenal dengan penghasil bawang merah terbesar dan menyumbang lebih dari 50% Produk Regional Domestik Bruto (PRDB). Apalagi kita tahu bahwa Brebes mulai tumbuh kawasan industri dan juga banyak daerah yang dapat dijadikan tempat wisata jika dimanfaatkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena pajak dari potensi tersebut menjadi salah satu sumber terbesar yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Brebes setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. Peningkatan ini dapat dipakai untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat supaya terbina kesejahteraan masyarakat. Penurunan yang signifikan pada pendapatan asli daerah menunjukkan aktivitas daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah sangat rendah. Penurunan tersebut diakibatkan oleh peningkatan pendapatan transfer dan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan menurunnya pendapatan BLUD. Penurunan juga bisa diakibatkan oleh adanya penurunan pajak daerah.

Realita menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya dalam mendanai belanja daerahnya, hal ini dilihat dari besarnya anggaran transfer pemerintah pusat. Fernandes & Fauzia [5] menyatakan dana alokasi umum sebagai dana yang sumbernya dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan berdasarkan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam melaksanakan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Brebes Tahun 2018 masih berfluktuasi, adanya penurunan di tahun tahun 2020, 2021 dan 2022 menandakan daerah berusaha mengurangi ketergantungan. Mahardika & Fauzan [6] dana alokasi umum dengan kemandirian daerah mempunyai hubungan jika dana alokasi umum meningkat maka kemandirian keuangan suatu daerah rendah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 [7] pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi disebut dengan belanja modal. Daerah dituntut dan diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan yang dimilikinya dan salah satunya pemberian porsi belanja daerah dalam bentuk belanja modal yang lebih besar untuk pengoptimalan sektor-sektor produktif.

Besarnya belanja modal diharapkan mampu berdampak positif terhadap tumbuhnya ekonomi daerah sehingga tercipta kemandirian daerah. Kabupaten Brebes menunjukkan realisasi belanja cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dari pada untuk belanja pembangunan. Belanja pegawai yang besar dapat meningkatkan pengeluaran daerah dan stabilitas keuangan daerah menjadi terbebani [8]. Nurkhayati [9] dan Saleh [10] menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian daerah berpengaruh positif, menurutnya Semakin tingginya rasio Pendapatan Asli Daerah berarti tingkat kemandirian suatu daerah semakin baik. Namun hasil penelitian Utami [8] efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Sulangi dkk., [11] menyebutkan dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang positif. Sementara hasil penelitian Kustianingsih [12] dan Andriana [13] menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif, artinya jika dana alokasi umum naik akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Berbanding terbalik dengan penelitian Amalia & Haryanto [2] Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. Alasannya adanya penurunan kinerja pegawai pemerintah daerah dan

lebih cenderung menyalahgunakan anggaran belanja modal. Belanja modal lebih digunakan untuk pembangunan gedung, peralatan kantor, persediaan air dinas dan kebutuhan aparatur.

Berlangsungnya desentralisasi fiskal di Indonesia, maka diperlukan penelitian sebagai tolak ukur hasil dari berlangsungnya otonomi daerah apakah suatu daerah telah sesuai dengan tujuan tersebut, kemudian mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhinya, sehingga berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)".

### **Stewardship Theory**

Teori *Stewardship* atau dikenal sebagai teori penatalayanan (pengelolaan) diartikan sebagai teori yang memvisualisasikan situasi dimana para manajer atau pemimpin dalam suatu organisasi tidaklah termotivasi oleh kepentingan individu. Dimana para eksekutif sebagai *steward* terdorong untuk berlaku sesuai keinginan principal, dan berupaya agar sasaran organisasinya tercapai [6]. Teori ini dibentuk atas dasar asumsi filosofis yang menerangkan bahwa sifat manusia pada hakikatnya dapat dipercaya serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran dalam mengupayakan kepentingan principal dan pihak lain [14]. Teori ini bisa diterapkan pada penelitian yang menggunakan organisasi *non profit* seperti pemerintah.

Terlibatnya teori *stewardship* dengan penelitian ini pada dasarnya pemerintah daerah didaulat sebagai lembaga yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kepentingan umum, dengan implikasi pemerintah daerah bertindak dijadikan sebagai pelayan, penerima amanah dalam hal menerima dan menggunakan sumber penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah berorientasi kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan [10]. Pemerintah sebagai steward harus bersikap sesuai dengan perspektif teori pengelolaan, karena pemerintah sebagai peran utama dalam menjalankan manajemen pengelolaan daerah yang harus berlaku rasional dan tidak termotivasi oleh keinginan dirinya. Tetapi lebih difokuskan sebagai penerima amanah yang mempunyai motif sejalan dengan tujuan principal yaitu kemandirian.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah sejumlah pendapatan yang berasal dari perekonomian aslinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 [15] menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jenis pendapatan yang di dapat atau dipungut daerah sesuai atas dasar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pajak, retribusi Hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai penerimaan hasil dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan untuk menilai tingkat kemandiriannya di bidang keuangannya [16]. Menurut Ramadhan dkk., [17] apabila daerah dengan pendapatan asli daerah yang dipunyai retalif besar menandakan penerimaan daerah juga akan semakin meningkat dan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin menurun.

### **Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum adalah dana dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [15]. Penggunaan dana tersebut diserahkan kepada daerah sesuai priority dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Andriana, [13] Sumber pendapatan ini selanjutnya akan dipakai untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Dari pengertian diatas dana alokasi umum menjadi sarana untuk mengatasi ketimpangan

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

antar daerah dan juga sebagai sumber pembiayaan daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan cenderung mendapatkan dana alokasi umum lebih banyak sehingga akan berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangannya.

### **Belanja Modal**

Belanja modal menurut Standar Akuntan Publik didefinisikan sebagai belanja modal pengeluaran/perbelanjaan untuk menambah aset tetap yang diharapkan dapat memberikan manfaat melebihi satu periode akuntansi. Menurut Wahyudin [18] mendefinisikan belanja modal adalah aset tetap diperoleh pemerintah dari pengeluaran satu anggaran yang dapat menunjukkan tingkat produktivitas suatu daerah. Termasuk juga biaya pemeliharaan yang dapat menambah masa manfaat, menambah kapasitas aset. Digdowiseiso [19] memberi kesimpulan bahwa belanja modal adalah aktivitas produktif yang diukur dari bagaimana pemerintah menggunakan anggarannya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Belanja modal mempunyai tujuan untuk aktivitas perbaikan dan pembangunan di berbagai sektor. Apabila daerah dengan sarana prasarana dan operasionalnya memadai akan menunjang kelancaran kegiatan sehingga akan lebih mudah kemandirian itu tercapai.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Sefira & Budiwitjaksono [20] mendefinisikan kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan dalam membiayai segala aktivitas atau kegiatan pemerintah dengan tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer. Kemandirian keuangan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 [21] diartikan pemerintah dapat melakukan pertanggungjawaban pembiayaan keuangan sendiri atas suatu kegiatan dalam rangka mencapai asas desentralisasi. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi otonomi daerah terkhusus pada bidang keuangan dapat dilihat dan diukur dari sejauh mana segala kegiatan pemerintahan dapat didanai sepenuhnya oleh pendapatan daerah seperti PAD dan bagi hasil daerah. Menurut Novianti & Ishak [22] apabila semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah maka tingkat ketergantungan terhadap dana bantuan pihak ekstern terutama transfer pusat dan provinsi semakin turun.

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan sekumpulan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atau mengurus rumah tangganya sendiri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 1 ayat 5 [23]). Dapat disimpulkan, daerah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat dalam mengelola dan menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan daerah dianggap lebih paham akan kondisi daerahnya sendiri, sehingga kepercayaan tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik guna terwujudnya suatu daerah yang mandiri.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipakai menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Populasi yang dijadikan pada penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dengan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2018-2022. Teknik penarikan sampel dengan teknik sensus/sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua populasi dijadikan sampel. Sampel berupa data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Brebes 2018-2022 yang dirinci perbulan. Analisis data yang digunakan dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

hipotesis. Pengolahan data menggunakan alat bantu *Microsoft Excel* 2010 dan *SPSS* Versi 25 dengan tujuan mempermudah pengolahan data. Analisis regresi linear berganda dikenakan dalam model analisis, adapun model persamaannya dapat diformulasikan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kemandirian Keuangan Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$B_1, B_2, B_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

$X_3$  = Belanja Modal

e = Error

Secara operasional, Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Sugiyono [24] menyatakan variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas sedangkan variabel independen merupakan variabel yang menyebabkan variabel lain berubah atau dikatakan sebagai penyebab variabel dependen tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel dependen berupa tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel independen penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Terdapat rasio untuk mengukur variabel dengan rumus sebagai berikut:

**Tabel 2.** Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Ukuran
<b>Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</b>	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$
<b>Pendapatan Asli Daerah (<math>X_1</math>)</b>	$= \text{LN (PAD)}$ $= \text{LN (Pajak Daerah+Retribusi Daerah+Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan+Lain-lain Pendapatan yang sah)}$
<b>Dana Alokasi Umum (<math>X_2</math>)</b>	$= \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
<b>Belanja Modal (<math>X_3</math>)</b>	$= \text{LN (Belanja Modal)}$

Sumber: Mahmudi [25] Halim (2017) Ariani & Putri [26]

### Perumusan Hipotesis

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai penerimaan hasil dari sumber-sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah [19]. Struktur pendapatan asli daerah yang kokoh maka daerah memiliki susunan pembiayaan yang tinggi dan dapat meminimumkan ketergantungan pada dana transfer. Artinya pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah. Era desentralisasi menganggap daerah dengan sumber pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan tingkat kemampuan keuangannya baik dan mampu mengurangi penggunaan dana transfer sehingga timbul kemandirian dalam segi keuangan. Dari hal tersebut daerah menunjukkan kemampuan keberhasilan dalam membiayai sendiri urusan pemerintah, pelayanan pada masyarakat bahkan pembangunan. Penerimaan dalam bentuk pendapatan asli daerah meningkat maka akan diikuti oleh adanya tingkat kemandirian keuangan daerah.

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

Tentunya dengan melalui kinerja dalam mengelola sumber daya dan pendapatan asli daerah akan memberikan rasa kepuasan kepada publik. Sesuai dengan teori *stewardsip* pemerintah mempunyai peranan sebagai *steward* yang bertugas mengelola keuangan daerah, guna memberikan pelayanan terbaik dan kinerja yang baik dalam menghasilkan pendapatan asli daerah untuk mencapai tujuan organisasinya yaitu kemandirian keuangan. Penelitian Saleh [10], Aisyah [27], Nurkhayati [9] bahwa pendapatan asli daerah memiliki keselarasan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan, karena pendapatan asli daerah dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah serta apabila pemerintah memaksimalkan potensi serta sumber daya yang ada dalam daerah maka akan mendapatkan pendapatan asli daerah tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kemandiriannya, sehingga hipotesis yang diambil:

H1 : Adanya Pengaruh Signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana alokasi umum adalah dana dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan APBN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [15]. Dana ini diberikan atas dasar kapasitas fiskal daerah, semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah akan semakin rendah transfer yang diterima begitu juga sebaliknya. Satu sisi kebijakan ini dapat mengatasi ketimpangan fiskal, namun disisi lain justru dapat menyebabkan kemalasan daerah dalam fiskalnya. Daerah tidak terpacu memaksimalkan potensi daerahnya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah karena lebih mendominankan penggunaan dana alokasi umum, karena hal ini berdampak pada penurunan dana alokasi umum. Pemerintah daerah dianggap kurang mampu meningkatkan kemandirian daerahnya jika daerah masih bergantung pada dana transfer dari pihak luar daerah sendiri. Artinya pemerintah dalam membiayai kegiatan atau urusan pemerintah masih bergantung pada dana tersebut.

Kaitannya dengan teori *stewardship theory* adalah pemerintah daerah sebagai *steward* diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengelola keuangan daerah atas perolehan dana alokasi umum agar dapat dimanfaatkan dengan baik guna memberikan pelayanan terbaik dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian Amalia & Haryanto [2], Andriana [13] dan Musfirati & Sugiyanto [28] yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada kemandirian keuangan, bahwa semakin naiknya dan alokasi umum justru tingkat kemandiriannya keuangannya kurang atau nilai DAU yang tinggi ketimbang PAD berarti ketergantungan terhadap dana alokasi umum semakin tinggi. Sehingga hipotesis yang diambil:

H2 : Adanya Pengaruh Signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Belanja Modal merupakan pengeluaran dalam bentuk belanja baik pusat maupun daerah dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang bertahan lebih dari satu tahun [29]. Pelaksanaan otonomi daerah diperlukan untuk terus meningkatkan sumber pendapatan, sebab diperlukan untuk membiayai segala bentuk kegiatan pemerintahan dalam bentuk belanja modal. Menurut Almas [30] bahwa banyaknya belanja modal menunjukkan bahwa daerah dapat menjalankan pemerintahannya. Seperti contohnya adalah peningkatan dalam hal pelayanan publik, seperti pembangunan dibidang sarana dan prasarana tujuannya dapat menunjang kelancaran usaha dan pemenuhan pelayanan dan partisipasi masyarakat. Terkait dengan teori *stewardship*, sebagai *steward* pemerintah daerah sebisa mungkin mengoptimalkan aset yang dimiliki agar dapat meningkatkan kinerjanya. Pengelolaan aset-aset yang tersedia termasuk penggunaan belanja modal yang dianggarkan perlu dikelola agar menghasilkan pendapatan daerah, serta pemerintah sebagai *steward* harus bertanggung jawab atas belanja modal dan menangani pemeliharaan aset. Sehingga aset tersebut nantinya mampu membantu dalam peningkatan pendapatan daerahnya sehingga tercipta kemandirian

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

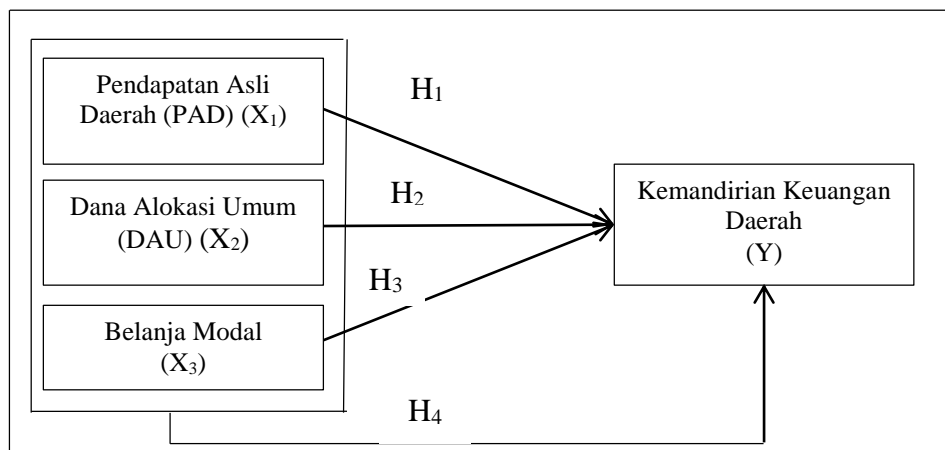
daerah. Semakin besar belanja modal adalah bukti bahwa semakin banyaknya infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, tentunya akan semakin banyak aset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan [31]. penelitian Riyadi [1] dan Novitasari & Novitasari [32] bahwa daya serap belanja modal dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sehingga hipotesis yang diambil:

H3 : Adanya Pengaruh Signifikan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Semakin besarnya penerimaan pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan semakin baik dan meminimalisir ketergantungan pemerintah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah juga masih membutuhkan dana transfer seperti dana alokasi umum sebagai dana untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Apabila dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, namun jika tidak dioptimalkan dengan baik maka akan menurunkan kemandirian keuangan daerah. Infrastruktur yang baik berupa peningkatan fasilitas umum juga merupakan salah satu belanja modal yang dapat menambah pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh Nindita & Rahayu [33] dan Aisyah [27] mendapati Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh pada Kemandirian Keuangan Daerah, sebab setiap pendapatan dan penerimaan daerah secara langsung berkontribusi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Maka hipotesis yang diambil:

H4 : Adanya Pengaruh Signifikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif dipakai untuk menyajikan gambaran umum dari variabel *dependent* serta *independent* ditinjau dari nilai terkecil, terbesar, rata-rata dan standar deviasinya [34]. Berikut adalah hasil analisis deskriptif yang dihasilkan melalui *software* IBM SPSS.

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

**Tabel 2.** Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	22,70	26,22	24,0439	,61352
DAU	60	,00	94,88	45,6807	23,61038
BM	60	,00	26,03	22,6555	4,73696
KKD	60	3,29	76,37	20,1260	15,56282
Valid N (listwise)	60				

Sumber: data diolah, 2022

Hasil penelitian pada tabel 2, menunjukkan untuk variabel independen yaitu pendapatan asli daerah memiliki nilai terendah sebesar 22,70 dan nilai tertinggi 26,22 sedangkan untuk nilai rata-rata (mean) yaitu 24,0439 serta standar devisiasinya sebesar 0,61352. Ditemukan nilai standar devisiasi atau simpangan bakunya lebih rendah dari nilai mean, maka penyebaran data variabel pendapatan asli daerah baik dan merata. Variabel dana alokasi umum yang memiliki nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi 94,88 sedangkan untuk nilai rata-rata (mean) yaitu 45,6807 serta standar devisiasinya sebesar 23,61038. Karena nilai standar devisiasi atau simpangan bakunya lebih rendah dari nilai mean, maka variabel pendapatan asli daerah penyebarannya baik dan merata.

Variabel Belanja Modal memiliki nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi 26,03 sedangkan untuk nilai rata-ratanya yaitu 22,6555 serta standar devisiasinya sebesar 4,73696. Karena nilai standar devisiasi lebih rendah dari nilai mean, maka penyebaran data variabel belanja modal baik dan merata. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah mempunyai nilai minimum sebesar 3,29 dan nilai maksimum 76,37 sedangkan untuk nilai rata-rata (mean) yaitu 20,12600 serta standar devisiasinya sebesar 20,1260. Disebabkan nilai simpangan bakunya lebih rendah dari nilai rata-rata, maka penyebaran data variabel kemandirian keuangan daerah baik.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas sebagai alternatif pengujian variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau *annormal* [34]. Pengujian melalui uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan meninjau nilai signifikansi *Exact P-Values*. Jika nilai residual lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai residual dibawah tingkat signifikansi 0,05 maka dikatakan berdistribusi atau *annormal*.

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8,67578747
Most Extreme Differences	Absolute	,118
	Positive	,118
	Negative	-,050
Test Statistic		,118
Exact Sig. (2-tailed)		,347

Sumber: data diolah, 2023

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

Tabel 3 menunjukkan nilai *unstandardized residual* dengan nilai signifikansi  $0,347 > 0,05$  maka data penelitian tersebut artinya memenuhi asumsi uji normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Model regresi dinyatakan baik jika tidak terdapat korelasi atau keterkaitan antar variabel bebas (independen) [34]. Jika ditemukan korelasi antar variabel bebas, maka model dikatakan baik. model regresi dikatakan layak bila memenuhi asumsi apabila nilai Tolerance  $> 0.01$  dan VIF  $< 10$  dan tidak layak apabila apabila nilai Tolerance  $< 0.01$  dan VIF  $> 10$ .

**Tabel 4** Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
PAD	,704	1,421	Bebas Multikolinearitas
DAU	,509	1,965	Bebas Multikolinearitas
BM	,667	1,500	Bebas Multikolinearitas

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan untuk ketiga variabel bebas (*independent*) menunjukkan nilai *tolerance* PAD  $0,704 > 0,10$ , DAU  $0,509 > 0,10$ , Belanja Modal  $0,667 > 0,10$  dan VIF untuk variabel PAD  $1,421 < 10$ , DAU  $1,965 < 10$ , Belanja Modal  $1,500 < 10$  berarti menandakan model ini bebas multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Uji ini merupakan tahap pengujian model regresi untuk mendekteksi adanya korelasi kesalahan pengganggu pada periode sekarang (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) [34]. model regresi dikatakan baik apabila model regresi terbebas dari gejala autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu dengan Uji *Durbin-Watson*, dinyatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai  $du < dw < 4-du$ .

**Tabel 5.** Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,830 <sup>a</sup>	8,90514	1,910

a. Predictors: (Constant), BM, PAD, DAU

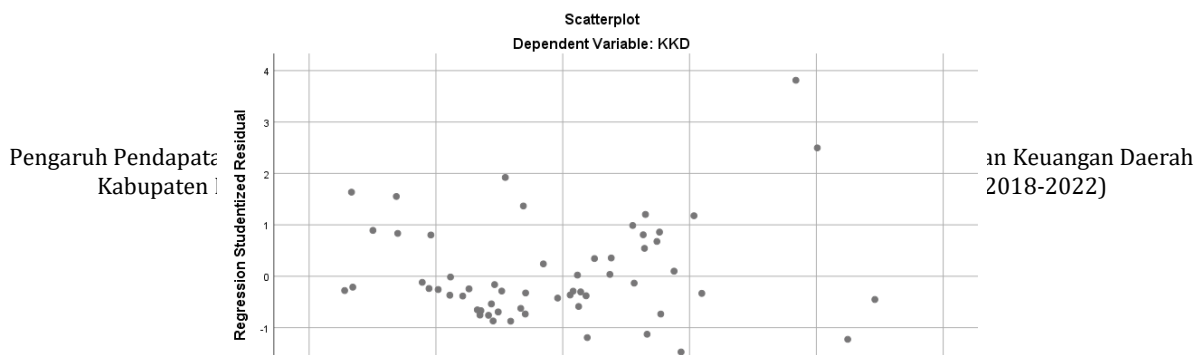
b. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji autokorelasi dengan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,910. Diperoleh nilai *dl* pada tabel sebesar 1,4797 dan nilai *du* pada tabel sebesar 1,6889 sedangkan nilai  $4-du$  sebesar 2,3111. Sesuai dengan syarat tersebut maka dapat dikatakan model regresi terjadi secara random atau tidak terjadi autokorelasi karena menunjukkan nilai  $1,4797 < 1,910 < 2,3111$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk mendeteksi suatu model apakah mengalami ketidaksamaan variance nilai residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lain [34]. Analisis pengujian ini menggunakan Uji Scatterplot. Dasar pengambilan keputusan ini, jika titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, berindikasi tidak menimbulkan gejala heteroskedastisitas [34].



### Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan terlihat pada gambar pola titik-titik scatterplot pada uji tersebut tersebar secara luas diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dapat disimpulkan berindikasi tidak menimbulkan gejala heteroskedastisitas, sehingga memenuhi syarat uji asumsi klasik.

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Analisis Regresi Linear Berganda digunakan sebagai upaya untuk mengukur pengaruh, kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel atau lebih dengan variabel bebas dan terikatnya [34].

**Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-399,854	56,75		-7,046	,000
	PAD	17,981	2,253	,709	7,982	,000
	DAU	-,151	,069	-,230	-2,198	,032
	BM	-,241	,300	-,073	-,802	,426

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -399,854 + 17,981 X_1 + (-0,151 X_2) + (-0,241) X_3 + e$$

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -399,854 merupakan konstanta saat variabel kemandirian keuangan daerah belum dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Artinya ketika nilai variabel independen adalah nol maka pengungkapan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar -399,854.
- Variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien regresi 17,981 bernilai positif, hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan variabel PAD maka akan meningkat tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 17,981 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya nilainya tetap.

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

- c. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai koefisien regresi 0,151 bernilai negatif, hal ini menunjukkan setiap kenaikan nilai 1 satuan pada variabel DAU, maka nilai variabel kemandirian keuangan daerah akan berpengaruh menurunkan sebesar 0,151. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya nilainya tetap.
- d. Variabel Belanja Modal (X3) memiliki nilai koefisien regresi 0,241 bernilai negatif, menunjukkan setiap kenaikan nilai 1 satuan pada variabel Belanja Modal maka nilai variabel kemandirian keuangan daerah akan menurun sebesar 0,241. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya nilainya tetap.

### Uji hipotesis

#### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model penelitian mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel dependennya [34].

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,830 <sup>a</sup>	,689	,673	8,90514

Sumber: data diolah, 2023

Terlihat koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,673. Hal tersebut diartikan nilai variansi variabel bebas memiliki kemampuan untuk menjelaskan sebesar 67,3%. Sementara sisanya 32,7% dijelaskan faktor lain di luar penelitian.

#### Uji Parsial (t)

Pada dasarnya uji parsial untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independenya secara individu dalam menerangkan variabel variasi/dependenya [34]. Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya variabel independen berpengaruh namun nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

**Tabel 8.** Hasil Uji Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-399,854	56,75		-7,046	,000
	PAD	17,981	2,253	,709	7,982	,000
	DAU	-,151	,069	-,230	-2,198	,032
	BM	-,241	,300	-,073	-,802	,426

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: data diolah, 2023

Hasil pengujian statistik t untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan kriteria uji t pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan  $(df) = n - k - 1$ ,  $(df) = 60 - 3 - 1 = 56$ , sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,6725. Hasil uji statistik t diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi variabel sebesar  $0,000 < 0,05$  dan hasil koefisien  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,982 > 1,6725$ ). Sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

- b. Dana alokasi umum dengan hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,032 < 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-2,198 < -1,6725$ ). Dengan demikian menyatakan adanya pengaruh negatif signifikan antara dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- c. Belanja modal dengan hasil menunjukkan nilai signifikansi variabel belanja modal sebesar  $0,426 > 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,802 > -1,6725$ ). Dengan demikian maka menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan antara belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

### Uji Simultan (F)

Pada dasarnya uji simultan berfungsi menguji hipotesis secara bersama-sama (joint), uji hipotesis ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan [34]. Untuk membuktikan pengaruhnya dapat dilakukan dengan cara melihat membandingkan nilai signifikan dengan syarat  $sig < 0,05$  maka dapat diinterpretasikan semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 9.** Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9848,994	3	3282,998	41,399	,000 <sup>b</sup>
	Residual	4440,888	56	79,302		
	Total	14289,882	59			

a. Dependent Variable: KKD  
b. Predictors: (Constant), BM, PAD, DAU

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai F hitung 41,399 dengan signifikansi bernilai 0,000. Dengan nilai signifikansi yang jauh lebih kecil dari 0,05 (5%) atau  $0,000 < 0,05$ , kemudian F hitung  $> F$  tabel ( $41,399 > 2,77$ ) maka kesimpulannya model regresi dapat memprediksi atau bisa dikatakan variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t), diperoleh jika secara parsial menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan. Pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,982 dan taraf signifikansi  $0,000 < 0,05$  sedangkan  $t_{tabel}$  memiliki nilai sebesar 1,6725, karena nilai  $t_{hitung}$  berada didaerah penerimaan  $H_a$  dan koefisien bernilai positif maka nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,982 > 1,6725$ ) mengindikasikan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif, oleh karena itu hipotesis pertama bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah **diterima**.

Dengan memiliki t hitung sebesar 9,256 dan taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, pendapatan asli daerah naik maka akan meningkatkan kemandirian keuangan begitu juga sebaliknya. Pendapatan asli daerah yang berpengaruh memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, karena realisasi pendapatan asli daerah merupakan sumber yang nantinya dapat dipergunakan dalam rangka menyongsong pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu tercipta daerah yang memiliki kemandirian dan terlaksakannya tujuan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah tersebut sehingga dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh akan memvisualisasikan kondisi daerahnya. Pendapatan asli daerah juga menjadi sumber keuangan yang membantu dalam sumber pendapatan yang membantu dalam mengurangi tingkat

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam hal membiayai kegiatan pemerintahannya, karena pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam kemandirian keuangan.

Rata-rata tingkat kemakmuran pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes selama lima tahun sebesar 26,73% yang menunjukkan tingkat kemakmuran pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes belum begitu tinggi serta tingkat kemandirian keuangannya sebesar 18,58% yang bersifat instruktif, mempekuat indikasi semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka tingkat kemakmurannya semakin tinggi juga tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Brebes, hal tersebut menandakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Kabupaten Brebes. Berkaitan dengan teori *stewardship*, bahwa pada dasarnya pemerintah mempunyai peranan penting sebagai *steward* yang bertugas melangsungkan pemerintahan guna tercapainya tujuan serta mengelola keuangan daerah diharapkan pemerintah sebagai *steward* mampu mengoptimalkan sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah sehingga mampu dipergunakan untuk pembangunan daerah, dengan membangun daerah menciptakan kinerja yang baik dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan kemandirian. Pemerintah Kabupaten Brebes lebih menekankan hasil atas pendapatan asli daerah terutama dari sumber penerimaan pajak dan retribusi, apalagi brebes sudah mulai berdiri perusahaan-perusahaan sehingga akan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Saleh [10], Aisyah [27], Nurkhayati [9] dan Wasil dkk.,(2020) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t), diperoleh jika secara parsial menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,198 dan taraf signifikansi  $0,032 < 0,05$  sedangkan  $t_{tabel}$  memiliki nilai sebesar 1,6725, karena nilai  $t_{hitung}$  berada didaerah penerimaan  $H_a$  dan koefisien bernilai negatif maka nilai  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  (-2,198 < -1,6725) sehingga mengindikasikan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan berarah negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Oleh karena itu hipotesis kedua bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan **diterima**.

Dana alokasi umum menjadi bagian dari dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat yang dapat menghilangkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menurunkan kesenjangan pendanaan antar daerah. Dana alokasi umum menjadi cerminan bergantungnya daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga apabila penggunaannya meningkat akan berpengaruh menurunkan tingkat kemandirian keuangannya karena kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri masih tergolong rendah. Pengaruh yang signifikan mengindikasikan daerah masih mengandalkan dana transfer pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Alasan mengapa dana alokasi umum berpengaruh negatif pertama, dana alokasi umum merupakan dana transfer pemerintah pusat yang peruntukannya tidak diatur oleh perundang-undangan dengan kata lain dana ini dikelola terserah kebutuhan daerah masing masing. Kedua, pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak pada dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah, kondisi ini disebut sebagai *flypaper effect*. Ketiga, pengalokasian dana alokasi umum belum digunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga penggunaannya belum mencapai target atau tujuan yang utamanya adalah untuk kepentingan publik dan berdaya guna. Daerah lebih mengandalkan sumber pendanaan lain dalam pembiayaan dengan cenderung mempertahankan dana alokasi umum dikarenakan jumlahnya sangat besar daripada mengupayakan peningkatan pendapatan sendiri, dari hal tersebut daerah tidak menjadi mandiri akan tetapi semakin bergantung kepada pemerintah pusat. Menurut [26] menemukan daerah

yang tergolong mempunyai pendapatan daerah yang rendah menyikapi pemberian transfer bukan sebagai stimulus.

Sesuai dengan teori penatalayanan dapat dikatakan bahwa pemerintah yang semakin berkembang adalah pemerintah daerah yang mampu mengurangi bantuan dana dari pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan terbaik dan mampu membiayai aktivitas kegiatannya secara mandiri, dari hal tersebut nantinya dapat berdampak pada peningkatan kemandirian. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Kustianingsih dkk., [12] Amalia & Haryanto [2] dan Ariani & Putri [26] dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan berarah negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t), diperoleh jika secara parsial menyatakan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan. pengaruh ini ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,802 dan taraf signifikansi 0,426 lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  memiliki nilai sebesar 1,6725 karena nilai  $t_{hitung}$  berada didaerah penolakan  $H_a$  dan berkoefisien negatif maka nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  (-0,802 > -1,6725) mengindikasikan bahwa variabel belanja modal dapat dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis ketiga bahwa belanja modal berpengaruh signifikan **ditolak**.

Belanja modal dijadikan pengeluaran yang dapat menambah aset tetap yang dapat memberikan manfaat tersendiri pada periode tertentu. Belanja modal sifatnya adalah dapat menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal seringkali digunakan untuk menambah aset, namun jika aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau difungsikan dengan baik seringkali tidak dapat membantu dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Belanja modal yang dikeluarkan daerah tidak selamanya berdampak pada kenaikan tingkat kemandirian keuangan melainkan hanya akan meningkatkan jumlah pengeluaran atau perbaikan yang harus didanai oleh daerah menggunakan dana transfer seperti dana alokasi umum jika dana pendapatan asli daerah yang dihasilkan rendah. Contohnya pembelian aset tanah atau bangunan yang dijadikan sebagai aset daerah, tanpa dikelola dengan baik hanya menjadi aset terbengkalai dan investasi pada belanja modal tidak menambah pendapatan asli daerah yang dapat menjadikan daerah tersebut menjadi mandiri, atau pembelian aset peralatan kantor dan kendaraan, hal tersebut akan menambah pengeluaran daerah, sebab butuh adanya perawatan namun belum dapat secara langsung menghasilkan pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan teori penatalayanan (*stewardship*) belanja modal yang tidak berpengaruh memberikan sinyal bahwa pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengatur serta mengelola belanja modal lebih memprioritaskan belanja modal pada belanja yang sifatnya belum dapat menambah atau menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Amalia & Haryanto, [2], Baviga & Bahrun [3] dan Andriana [13] dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F), diperoleh jika secara simultan menyatakan bahwa variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan, dengan memiliki F hitung sebesar 41,399 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,77 sehingga menghasilkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel serta taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dalam hal ini secara simultan variabel independen memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Brebes. Pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah yang bersangkutan sehingga apabila pendapatan asli daerah dapat dioptimalisasi dengan baik akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Apabila Pemerintah Daerah semakin memaksimalkan peningkatan PAD dengan terus menggali sumber-sumber-sumber PAD sehingga

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

akan meningkatkan belanja modal dengan didanai oleh pendapatan asli daerahnya tanpa mengandalkan dana transfer, dan selain itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat yang menunjukkan kemandirian keuangan semakin baik. Semakin meningkat kemandirian keuangan daerah apabila suatu daerah mampu memaksimalkan pendapatan daerahnya serta mampu meminimalkan dana bantuan dari pemerintah pusat serta realisasi belanja modal dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah sehingga secara bersama mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ditinjau dari nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,673 atau 67,3%. Mempunyai arti bahwa sebesar 67,3 % variabel dependen atau tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal). Berkaitan dengan dengan teori penatalayanan (stewardship) pemerintah sebagai agen perlu menunjukkan kinerja yang baik dengan mengelola sumber pendapatan yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan untuk kepentingan publik guna menghasilkan suatu pendapatan asli dari daerahnya dengan begitu kegiatan belanja modal mampu dibiayai sendiri dan penggunaan transfer pemerintah semakin berkurang sehingga akan terwujud kemandirian daerah.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan diatas didapat beberapa kesimpulan. Pertama, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes periode 2018-2022. Kedua, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes periode 2018-2022. Ketiga, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes periode 2018-2022. Keempat, secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes periode 2018-2022.

#### SARAN

Saran yang disampaikan didasarkan atas hasil penelitian dan merujuk pada keterbatasan penelitian ini, disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain atau mencari variabel baru yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemandirian. Sekaligus dapat menambah rentang waktu penelitian agar lebih luas lagi dalam pengungkapan tingkat kemandirian keuangan daerah. Bagi masyarakat, diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah seperti kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi agar dapat menurunkan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Bagi pemerintah Kabupaten Brebes, hendaknya terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah dengan melakukan kinerja yang baik dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih menggali potensi daerahnya dengan begitu secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] W. Riyadi, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat," vol. 3, pp. 298-314, 2022.
- [2] A. F. Amalia and Haryanto, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017," *Diponogoro J. Account.*, vol. 8, pp. 1-13, 2019.
- [3] R. Baviga and Z. Bahrin, "Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020," vol. 4, no. 1, pp. 52-62, 2022.

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)

- [4] Y. D. Ristianti and E. Handoyo, "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah," vol. 2, no. 32, 2017.
- [5] J. Fernandes and L. Fauzia, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2017-2020," *J. Revenu Akunt.*, vol. 3, no. 10.46306/rev.v3i1, pp. 187–197, 2022.
- [6] E. P. Mahardika and Fauzan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019," *Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, 2022.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan." 2010.
- [8] B. Utami, "Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Skripsi*, 2018.
- [9] E. D. Nurkhayati, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo," 2020.
- [10] R. Saleh, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Inf. perpajakan, Akunt. dan Keuang. publik*, vol. 15, no. 2, pp. 111–134, 2020.
- [11] P. G. Sulangi, C. Anwar, and I. G. K. A. Ulupui, "The Effect Of General Allocation Funds, Economic Growth, and Area on The Level of Financial Independence of The Orivincial Government Regions In Indonesia," *J. Akunt. Perpajak. dan Audit.*, vol. 3, no. 2, pp. 328–338, 2022.
- [12] N. Kustianingsih, M. Muslimin, and A. Kahar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah," pp. 82–91, 2018.
- [13] N. Andriana, "Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah," *J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 2, no. 3, pp. 105–113, 2020.
- [14] S. Ayem and E. Fitriyaningsih, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," vol. 2, no. 2, pp. 446–463, 2022, doi: 10.29264/jfor.v24i2.10869.
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, "Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." 2004.
- [16] K. D. Tolosang, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Kota Tomohon," vol. 18, 2018.
- [17] M. Ramadhan, M. Kustiawan, and Fitriana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah," vol. 2, no. 6, 2022.
- [18] I. Wahyudin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat The Influence Of Original Local Government Revenue , Fiscal Balance Transfer And Capital Expenditure," vol. 1, no. 1, pp. 86–97, 2020.
- [19] K. Digidowiseiso, "Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2012-2019 dengan Populasi dan Rata-Rata Lama Sekolah Sebagai Variabel Kontrol," vol. 5, no. 3, pp. 2026–2038, 2021.
- [20] M. V. P. Sefira and G. S. Budiwitjaksono, "Analisis PAD dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur 2019-2020," vol. 13, no. 23, pp. 938–947, 2022.
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," no. 244, 2014.
- [22] D. Novianti and J. F. Ishak, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung," *Indones. Account. Res. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 244–250, 2022.



- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun Pasal 1 ayat 5, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." 2004.
- [24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2019.
- [25] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Politik.*, Edisi Kedu. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- [26] K. R. Ariani and G. A. Putri, "Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah," *Semin. Nas. dan Syariah Pap.*, pp. 364–369, 2016.
- [27] S. Aisyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Periode Tahun Anggaran 2012-2018," 2019.
- [28] A. Musfirati and H. Sugiyanto, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah," vol. 5, pp. 20–36, 2019.
- [29] M. Fajerin, "Tata Kelola Belanja Modal dan Belanja Pegawai Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2016," *JIEB*, no. November, pp. 361–376, 2018.
- [30] A. B. Almas, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Peimbangan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah," 2022.
- [31] D. M. E. Aditya and Maryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi)," no. 33, pp. 978–979, 2018.
- [32] M. Novitasari and L. Novitasari, "Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah," vol. 3, no. 2, 2019.
- [33] N. L. Nindita and S. Rahayu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat," vol. 2, no. 1, pp. 12–19, 2018.
- [34] I. Ghozali, "Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9," 2018.
- [35] M. Wasil, N. S. Putri, A. Larasati, and N. Mufida, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo," no. 2017, 2020.

(Melly Pitria Indriani, Hilda Kumala Wulandari, Titi Rahmawati)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022)